

CONTOH SOAL TES TERTULIS PPK PEMILU
BY INSPIRED2WRITE

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang...

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Pengawas Pemilihan Umum
- c. Penyelenggara Pemilihan Umum
- d. Komisi Pemilihan Umum
- e. Dewan Kehormatan Pemilihan Umum

Jawaban: C

2. Kelembagaan penyelenggara Pemilu kedudukannya terdapat dalam konstitusi UUD 1945 pasal 22 E berbunyi..

- a. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
- b. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayai oleh APBN dan APBD
- c. Pemilihan Umum diselenggarakan Luber dan Jurdil
- d. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP

Jawaban: A

3. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal...

- a. Pasal 19
- b. Pasal 20
- c. Pasal 21
- d. Pasal 22

Jawaban: D

4. Struktur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yaitu...

- a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
- b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN
- c. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP
- d. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PTS

Jawaban: B

5. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :
- a. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
 - b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
 - c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
 - d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban: D

6. Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang jumlah anggotanya sebanyak...
- a. 3 (tiga) orang
 - b. 5 (lima) orang
 - c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
 - d. 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang

Jawaban: C

7. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah:
- a. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - b. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia
 - c. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan
 - d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 - e. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi

Jawaban: A

8. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam :

- a. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jawaban: D

9. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan

Jawaban: B

10. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama...

- a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
- b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
- c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
- d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

Jawaban: A